

KOMUNIKASI LINGKUNGAN SINERGITAS PT TIRTA MADU DENGAN STAKEHOLDER LAIN DALAM PEMAJUAN KAWASAN SITUS BUKIT KERANG KAWAL DARAT (BKKD) DI KABUPATEN BINTAN

*(Environmental Communication Synergy of PT Tirta Madu With Other
Stakeholders for Promotion of the Bukit Kerang Kawal Darat (BKKD) Site Area
in Bintan Regency)*

Defri Elias Simatupang^{1*}

¹Balai Arkeologi Sumatera Utara – Indonesia, Jl. Seroja Raya, Medan 20134

*Email: defri.simatupang@kemdikbud.go.id

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji upaya pemajuan Kawasan Situs Bukit Kerang Kawal Darat (BKKD) melalui sinergitas PT Tirta Madu dengan stakeholder lain (institusi pemerintah, akademisi, lembaga publik, dan perorangan). Situs BKKD memiliki nilai penting karena kelangkaannya dan berada dalam kawasan perkebunan kelapa sawit PT Tirta Madu. Sudah lebih dari sepuluh tahun sejak diteliti bertahap, belum menunjukkan pemajuan kawasan terkait peningkatan nilai ekonomi masyarakat, sosial, dan lingkungan. Akses menuju situs BKKD, yang harus melewati areal perkebunan milik PT Tirta Madu, suka tidak suka membuat PT Tirta Madu turut bertanggungjawab. Tujuan kajian ini adalah untuk memahami potensi sinergi PT Tirta Madu dan stakeholder lain dalam upaya pemajuan kawasan Situs BKKD yang ramah lingkungan. Untuk mendapatkan pemahaman mendalam, dilakukan analisis deskriptif terhadap dua produk hukum undang-undang yang mendukung Pemajuan Kawasan Situs BKKD melalui sinergi berbagai stakeholder. Data-data dimasukkan kedalam kerangka tahapan-tahapan komunikasi lingkungan sebagai bagian dari tawaran solusi pemajuan Kawasan Situs BKKD yang berkelanjutan. Setelah dilakukan analisis dan pembahasan, menghasilkan sebuah model konsep sinergitas stakeholder yang ramah lingkungan yang digagas oleh PT Tirta Madu sendiri. Kajian ini menyimpulkan bahwa terdapat potensi keuntungan yang dicapai PT Tirta Madu, bila bergerak lebih aktif dalam upaya pemajuan Kawasan Situs BKKD.

Kata kunci: Komunikasi Lingkungan, stakeholder, sinergitas, PT Tirta Madu, Situs BKKD

ABSTRACT

This paper examines how are the efforts of promoting the Bukit Kerang Kawal Darat (BKKD) Site Area through the synergy of PT Tirta Madu with other stakeholders (government institutions, academics, public institutions, and individuals). The BKKD site has important value because of its rarity and its located within the PT Tirta Madu oil palm plantation area. It has been more than ten years since it has studied in stages. Still, it has not shown any progress in the field related to increasing the economic value of the community, social and environment. Access to the BKKD site, which must pass through the plantation area owned by PT Tirta Madu, likes or dislike making PT Tirta Madu was responsible. The purpose of this study is to understand the synergy potential of PT. Tirta Madu and other stakeholders in efforts promoting the environmentally friendly BKKD Site area. Gain an in-depth understanding, a descriptive analysis of two licensed products that support the BKKD Site area promotion has developed through the synergy of various stakeholders. The data included in the framework of the stages of environmental communication as part of the offer of solutions to promote the BKKD Site Area, which is sustainable. After analysis and discussion, environmentally friendly stakeholder synergy concept model has produced, which was initiated by PT Tirta Madu itself. There is a potential profit achieved by PT Tirta Madu if it moves more actively in the promotion of the BKKD Site Area..

Keywords: Environmental Communication, stakeholder, synergy, PT Tirta Madu, BKKD Site



1. PENDAHULUAN

Berawal dari pengesahan undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, penulis tertarik mengkaji kemanfaatan UU tersebut pada kawasan cagar budaya Situs Bukit Kerang Kawal Darat (selanjutnya disingkat Situs BKKD). Keberadaan Situs BKKD di wilayah Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau telah pernah dipublikasikan lewat berbagai media sejak tahun 2008. Sejak itu hingga kini, Balai Arkeologi Sumatera Utara sebagai institusi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi melakukan penelitian cagar budaya di Situs BKKD (wilayah kerjanya) telah beberapa kali melakukan tahapan penelitian arkeologis. Sejauh ini hasil penelitian menunjukkan kronologi waktu berdasarkan pertanggalan radiocarbon (C-14) di awal penelitian menghasilkan angka 1680 ± 110 BP atau sekitar tahun 300 Masehi. Data artefaktual yang ditemukan di Situs BKKD tampaknya mempertegas bahwa situs ini dimanfaatkan pada periode neolitik (Simatupang, 2017 : 65). Keberadaan situs tinggalan manusia prasejarah ini semakin memiliki nilai penting urgensi pemajuan karena letaknya dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit PT Tirta Madu. Ancaman kerusakan lingkungan diupayakan terhindar melalui koordinasi pengelolaan yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder) terhadap Situs BKKD.

PT Tirta Madu merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit, yang wilayah perkebunannya termasuk mengelilingi situs (gambar 1). Sebagai sebuah perusahaan, memiliki kewajiban penyaluran dana corporate social responsibility (selanjutnya disingkat CSR), yang idealnya tepat sasaran. Umumnya Dana CSR disalurkan kepada masyarakat disekitar perusahaan, diberikan dalam bentuk dana pembinaan usaha masyarakat lokal dan penyaluran bantuan sosial budaya dan lingkungan. Dana CSR PT Tirta Madu idealnya dapat disalurkan kepada masyarakat sekitar Situs BKKD dalam bentuk kontribusi upaya pemajuan kawasan situs. Tentu bukan hal baru PT Tirta Madu memahami keberadaan Situs BKKD, yang sudah sering diteliti dan dikembangkan oleh instansi pemerintah seperti : Balai Arkeologi Sumatera Utara, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Banda Aceh, Dinas Kebudayaan provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan. Namun kesemua institusi belum pernah bersinergi dengan PT Tirta Madu.



Padahal sinergitas merupakan proses memadukan beberapa aktivitas demi mencapai hasil yang berlipat. Sinergitas tercapai bila ada kesepakatan awal untuk kerjasama antar stakeholder. Dalam mencegah kerusakan lingkungan kawasan Situs BKKD, sinergitas memunculkan langkah-langkah teknis demi menghindarkan kerusakan lingkungan.

Kajian komunikasi lingkungan menjadi isu utama tulisan ini yang membutuhkan berbagai langkah teknis para stakeholder memanfaatkan media demi pemajuan kawasan Situs BKKD. Herutomo dalam tulisannya tentang komunikasi lingkungan untuk hutan berkelanjutan menyatakan peran media massa cetak, elektronik dan media sosial dengan pemberitaan yang investigatif tentang masalah kehutanan dapat menumbuhkan kesadaran dan partisipasi untuk turut mengelola hutan berkelanjutan (Herutomo, 2013 : 47). Kesadaran publik berpartisipasi muncul menunjukkan keberhasilan berkomunikasi melalui media. Namun pemahaman lemah publik tidak seharusnya direspon arkeolog, tanpa memahami publik mana yang diajak berkomunikasi. Karena hanya akan menghasilkan interpretasi yang tidak tepat sasaran (Merriman, 2004 : 8). Ketidaktepatan berkomunikasi harus diminimalisir, publik sebagai sasaran publikasi diharapkan tidak merespon negatif bila terjadi miskomunikasi. Apabila terjadi sinergitas, institusi pemerintah di bidang kebudayaan idealnya semakin lebih aktif memfasilitasi. Sinergitas membuat nafas penelitian dan pemanfaatan sumber daya budaya kembali menyatu, sejalan dalam upaya mengenali riwayat sejarah kebudayaan Indonesia. Hal ini dapat memberikan sebuah pengetahuan lebih tentang nilai-nilai luhur yang ada pada masa lampau, yang kontekstual di masa kini (Restiyadi, 2009: 6). Inilah yang melatarbelakangi tulisan ini, untuk mengkaji terkait peluang menjalin sinergitas antar stakeholder demi pemajuan kawasan Situs BKKD. PT Tirta Madu sengaja dijadikan stakeholder yang paling aktif untuk bersinergi. Permasalahan dirumuskan dalam kalimat tanya: “Bagaimana peluang Sinergitas PT Tirta Madu dalam Pemajuan Kawasan Situs BKKD di Kabupaten Bintan ? “





Gambar 1: Peta keletakan kawasan situs BKKD, dikelilingi kelapa sawit PT Tirta Madu

A. Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan kajian evaluatif, peneliti mencoba mengevaluasi mengapa pemajuan Kawasan Situs BKKD hingga terasa lambat. Pendekatan kualitatif dilakukan ketika berinteraksi sekaligus mengamati berbagai stakeholder sejak tahun 2011 - 2018 (ekskavasi arkeologis di Situs BKKD). Pengamatan menekankan penggunaan diri penulis sebagai alat mengamati data (Moleong 2005, 9). Hasil pengamatan (data primer) dianalisis secara deskriptif, membandingkannya dengan data sekunder (kepuustakaan), dengan memasukkan kedalam kerangka tujuh agenda strategis kebudayaan yang menjadi pedoman pemajuan kebudayaan nasional. Tujuh agenda tersebut nantinya dibahas satu persatu untuk melihat ada tidak kaitannya sesuai fokus tulisan. Hasil pembahasan coba dimasukkan dalam sebuah permodelan kerangka berpikir awal sebagai output penelitian untuk lebih mudah memahami solusi dari rumusan masalah.



Dengan membuat permodelan kajian komunikasi lingkungan lebih mudah dilihat kontribusinya secara tersistem apalagi dikaitkan dengan sinergitas. Kajian komunikasi lingkungan dalam tulisan ini, sangat bergantung kepada kedalaman pemahaman akan amanat UU pemajuan kebudayaan dan UU Cagar Budaya. Hasil kajian secara teoritis bermanfaat untuk semakin mendalami kajian pemajuan kawasan cagar budaya, terutama setelah berlakunya UU Pemajuan Kebudayaan tahun 2017. Adapun manfaat praktis, untuk membantu pemerintah atau siapa saja, solusi efektif pemajuan kawasan Situs BKKD.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. UU Pemajuan Kebudayaan dalam kaitan Pemajuan Kawasan Situs BKKD

UU RI Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan terdiri atas IX Bab, 61 pasal. Kesembilan bab tersebut : kebudayaan sebagai investasi, sistem pendataan kebudayaan terpadu, pokok pikiran kebudayaan daerah, strategi kebudayaan, rencana induk pemajuan kebudayaan, dana perwalian kebudayaan, pemanfaatan kebudayaan, penghargaan, dan sanksi (Seftiawan, 2017). Melalui UU ini, pemerintah mengajak publik merawat dan memanfaatkan kebudayaannya masing-masing daerah sebagai bahan penyusunan strategi pemajuan kebudayaan yang menjadi landasan pembangunan nasional. Strategi kebudayaan idealnya disusun berdasarkan masukan dari segenap stakeholders (bukan langsung dibuat para ahli atau peneliti kebudayaan). Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid menyatakan, empat langkah strategis pemajuan kebudayaan (pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan), secara kongkrit akan dilakukan penyusunan kebijakan dari bawah, kabupaten/kota, lalu ke provinsi hingga nasional yang rencananya disusun dalam kongres kebudayaan yang dilaksanakan pada 2018 (Eppang, 2017). Kongres Kebudayaan Tahun 2018 merupakan puncak penyusunan dokumen perencanaan secara berjenjang yang diawali dari penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah tingkat kabupaten / kota. Melihat waktu kongres yang telah berlalu, Kabupaten Bintan tentu telah mengirimkan pokok pikiran kebudayaan daerah mereka ke tingkat provinsi (Kepulauan Riau), dan provinsi ke tingkat pusat.



Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat sekitar situs BKKD, masih ada kebingungan terkait perbedaan pengelolaan situs cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Mereka menginginkan mendapat legalitas untuk memajukan kebudayaan mereka, di kawasan situs BKKD karena sudah dibebaskan oleh pemerintah. Bagi mereka itulah makna pemajuan kebudayaan mereka untuk dilindungi pemerintah. Pelindungan dalam UU Pemajuan Kebudayaan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan, dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi (Pasal 1 ayat 4). Adapun dalam UU Cagar Budaya, tidak ada kata pemajuan, yang ada kata “pengembangan” (pasal 1 ayat 29), yang dipahami sebagai upaya peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan. Makna kata pemajuan dan pengembangan tentu tidak sama, tetapi ada tujuan yang sama terkait menjaga keberlanjutannya. Cagar Budaya dan objek pemajuan kebudayaan memiliki peran penting untuk memupuk kesadaran jati diri bangsa dan mempertinggi harkat dan martabat bangsa di tengah-tengah peradaban dunia. Keduanya harus dilestarikan dengan strategi pengelolaan yang tepat, sesuai amanat UU Pemajuan Kebudayaan, khususnya yang berkaitan dengan strategi Kebudayaan.

Strategi kebudayaan mengacu pada dua produk hukum kebudayaan yang menekankan pada aspek pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan pada sumber daya budaya. Sumberdaya budaya yang maju tentu akan memajukan pariwisata, dan itu bukan hanya tugas pemerintah saja. Namun dalam beberapa kali wawancara dengan masyarakat sekitar Situs BKKD, mereka semakin pesimis akan adanya dana pemajuan Kawasan tersebut, melihat dari tahun ke tahun hanya pengecatan pagar keliling situs saja. Tidak jelas setelah pagar dicat, apa dan siapa lagi yang akan dilibatkan dalam upaya pemajuan kawasan Situs BKKD. Bahkan untuk pembebasan lahan agar semakin mendekati jalur sungai (lihat gambar 1). Padahal kompensasi yang diterima tidak selamanya berupa imbalan uang, namun pemerintah berusaha memberikan keringanan pajak, berupa bantuan tenaga dan/atau bantuan bahan sebagai penggantian biaya pelindungan lahan kepada pemilik, pengguna dan/atau pengelola cagar budaya



(Surbakti, 2017 : 149). Miskomunikasi seperti inilah yang menyebabkan perlunya sinergitas antara berbagai stakeholder agar pemajuan Kawasan Situs BKKD terwujud. Kesadaran yang kurang dapat diwadahi agar berbagai stakeholder dapat lebih berperan dalam isu yang lebih luas seperti isu kerusakan lingkungan.

B. Komunikasi Lingkungan dalam upaya Pemajuan Kawasan Situs BKKD

Isu kerusakan lingkungan sepertinya masih menjadi isu pinggiran, belum banyak diperhatikan publik dibandingkan isu ekonomi / politik. Konon isu kerusakan lingkungan dan pemajuan kebudayaan pada dasarnya dapat diselesaikan dari sudut pandang kepentingan ekonomi dan politik. Maka dibutuhkan sebuah strategi komunikasi untuk mampu berbicara yang tepat demi menyeimbangkan level kepentingan terhadap isu lingkungan dan pemajuan kebudayaan. Strategi komunikasi lingkungan harus dilakukan oleh komunikator yang tepat. Komunikator lingkungan harus dapat menggunakan berbagai jenis media dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing agar sesuai dengan situasi dan kondisi, termasuk penggunaan komunikasi interpersonal, edukasi, dan konseling (Wahyudin, 2017 : 133). Ward (1995) dalam Kurnia, mengatakan kalau keberadaan media dan proses „informatisasi“ selama ini masih belum banyak disentuh. Padahal beragam jenis media baru bisa dijadikan sumber informasi dari yang sangat massif hingga yang sangat personal melibatkan proses „informatisasi“ yang relatif berbeda dengan penerimaan audiens yang berbeda pula. Di samping itu, kecepatan perkembangan media baru didukung teknologi komunikasi yang semakin maju menunjukkan bahwa media komunikasi tidak bersifat tetap setiap saat (Kurnia, 2005 : 294-295).

Dengan mengangkat isu kerusakan lingkungan, kolaborasi antar stakeholder dapat menghasilkan pesan lebih kuat terkait pemajuan kawasan Situs BKKD. Apalagi ada komitmen dukungan pemerintah dan swasta. PT Tirta Madu melalui dana CSR berpotensi menunjukkan keberpihakannya terhadap pencegahan kerusakan lingkungan sekaligus berpartisipasi dalam upaya pemajuan kebudayaan. Bila melihat pada gambar 1, kawasan Situs BKKD dikelilingi perkebunan kelapa sawit PT Tirta Madu, bahkan untuk menuju situs (jalur darat) harus melalui perkebunan kelapa sawit PT Tirta Madu. Hal ini menunjukkan



adanya potensi simbiosis mutualisme antara kepentingan PT Tirta Madu dengan pemajuan kawasan Situs BKKD. Tentu saja nilai penting ekonomi perkebunan tidak sama dengan nilai penting situs cagar budaya. Nilai penting ekonomi Situs BKKD terletak pada kunjungan publik ke situs sebagai objek wisata. Namun situs BKKD belum dapat dikatakan objek wisata karena belum ada dukungan sarana prasarana yang memadai. Hal ini yang mengakibatkan nilai penting lingkungannya perlu dijaga melalui dana CSR PT Tirta Madu. Pandangan akan nilai penting lingkungan menghambat nilai penting ekonomi perlu dipatahkan. Strategi komunikasi lingkungan yang tepat sasaran diperlukan, agar para stakeholder tidak saling lempar tanggungjawab bila terjadi kerusakan lingkungan yang menelan kerugian.

Sinergitas PT Tirta Madu dengan institusi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat diharapkan menggugah kesadaran bekerjasama. Idealnya institusi pemerintah lebih aktif memfasilitasi kalau PT Tirta Madu bersedia menjadi *lead project*. PT Tirta Madu dapat menunjukkan kepedulian agar tidak selalu dicap sebagai perusahaan perusak lingkungan demi mendapatkan keuntungan ekonomi perusahaan. Pada beberapa koran lokal, kerap kali diberitakan masalah lingkungan yang dituduhkan ke PT Tirta madu. Memang kawasan perkebunan kelapa sawit yang homogen perlu dibatasi agar jangan sampai mengubah keseluruhan sebuah kawasan yang memiliki keragaman hayati dan penjaga rantai makanan. Namun apabila telah terjadi, penting sekali untuk coba membangun fitur alami dalam bentang alam, seperti penanaman koridor dan melindungi bukit. Maka PT Tirta Madu bisa memulai dengan penataan pada sekitar zona penyangga situs. Penanaman kembali tanaman-tanaman non kelapa sawit sepanjang area menuju situs. Hal ini penting sebagai bentuk kepedulian akan keragaman hayati. Secara otomatis publik akan semakin memiliki pandangan positif terhadap keberadaan PT Tirta Madu memanfaatkan dana CSR nya.

Publik kerap berpikir bahwa CSR itu donasi dari perusahaan, yang makin banyak diberikan menunjukkan kebesaran perusahaan tersebut. Namun dana CSR yang semakin besar, belum tentu menaikkan simpati terhadap keberlanjutan. Suparman dalam tulisannya mengatakan kalau reputasi tidak hanya dilihat dari besaran perusahaan, namun dilihat dari aspek tanggungjawab sosial organisasi.



Dana CSR akan memberikan keuntungan jangka panjang, jika ditempatkan sebagai bagian dari strategi besar organisasi (Suparman, 2013 : 80). Peran peneliti dapat diandalkan untuk melihat secara independen dan profesional terkait potensi PT Tirta Madu untuk mengambil alih sementara terkait upaya pemajuan Kawasan Situs BKKD. Sayangnya para peneliti arkeologi cenderung bekerja dalam bidang kepakarannya. Berbeda dengan jurnalis yang lebih mudah dan cepat mengangkat isu apapun asal mudah dipahami publik. Merriman menyarankan agar para arkeolog untuk publikasi meniru seperti jurnalis ketimbang akademisi dengan menjadi pelayan untuk komunitas yang mereka bayangkan. Pemahaman yang lemah dari publik tidak seharusnya direspon, tanpa mengetahui publik mana yang diajak berkomunikasi (Merriman, 2004 : 8). Sebagai contoh : dalam sebuah wawancara dengan masyarakat sekitar kawasan Situs BKKD, para pengunjung sering naik ke puncak bukit untuk berfoto tanpa menyadari potensi longsor. Tidak adanya tanda larangan naik, membuat publik bebas melakukan. Hal ini yang semakin memperburuk rendahnya nilai penting situs karena tidak adanya kerjasama yang baik antar institusi pemerintah, siapa mengerjakan apa. Disinilah keberadaan PT Tirta Madu dapat mengambil alih pengelolannya demi meningkatkan nilai penting situs dengan tetap mengangkat kampanye penyelamatan kerusakan kawasan lingkungan situs BKKD.

C. PT Tirta Madu dalam kaitan upaya pemajuan Kawasan Situs BKKD

PT Tirta Madu dalam mengembangkan bisnis perusahaan meraup keuntungan idealnya tetap ramah lingkungan. Misalkan PT Tirta Madu (melalui Dana CSR) dapat merancang strategi komunikasi agar Situs BKKD menjadi objek wisata lingkungan dan budaya. Bila tidak ada strategi maka target audiens, isi pesan, dan pemilihan media akan dilakukan secara sembarangan. Isi pesan akan hasil penelitian arkeologi dan potensi objek-objek pemajuan kebudayaan di Kawasan Situs BKKD akan diklarifikasi dahulu melalui media terpilih. Apabila respon publik tidak muncul secara terukur, perlu evaluasi, mungkin ada permasalahan pada media. Setiap institusi pemerintah sewajarnya memiliki media untuk publik dapat memberi masukan. Misalkan dalam sebuah wawancara, masyarakat ingin membari masukan terkait pengembangan kawasan Situs BKKD



kedepannya. Apakah perlu campur tangan PT Tirta Madu. Pandangan masyarakat bisa saja semakin buruk terhadap keberadaan perkebunan sawit yang telah merampas keanekaragaman hayati, merusak kekayaan flora fauna dan ekosistem. Bahkan ada yang menuduh tanpa bukti kuat kalau pendangkalan Sungai Kawal yang terhubung langsung ke laut cina selatan. Ada dugaan faktor penyebabnya adalah daerah aliran sungai (DAS) rusak akibat pengupasan lahan PT Tirta Madu. Dibutuhkan zonasi (zona inti, zona pendukung, dan zona penyangga) agar tidak saling berkonflik secara kepentingan.

Perlu langkah strategis membuat publik mudah memahami zonasi. Menurut Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseum, zona inti mutlak untuk mempertahankan keaslian cagar budaya, maka tidak boleh segala hal yang bersifat mengganggu. Zona Pendukung diperbolehkan untuk tempat fasilitas umum dan fasilitas pendukung/ untuk kepentingan komersil dengan mempertahankan nilai lingkungan budaya. Zona Penyangga diperbolehkan untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum, dengan memperhatikan luasannya (Hafizah, 2018). Dari hasil pengamatan, paling tidak zona inti Situs BKKD cukup hanya pada batasan pagar, selanjutnya diluar pagar batas tanah pemerintah dapat dijadikan zona pendukung, dan zona penyangga dimulai dari jembatan kawal dengan dua jalur air (sungai kawal) dan jalur darat melewati perkebunan PT Tirta Madu. Strategi yang tepat agar zonasi dapat diterima publik melalui pengelolaan sumberdaya budaya didasari atas tiga kepentingan, yaitu: untuk kepentingan ideologi (memantapkan identitas bangsa), untuk kepentingan akademis, dan untuk kepentingan tujuan Ekonomi, yaitu pemanfaatan “sumberdaya budaya” dalam bentuk barang dan jasa. Ketiga aspek dapat diperluas sesuai kebutuhan selama tetap berlandaskan upaya melestarikan warisan budaya nasional.

Kontribusi PT Tirta Madu dalam upaya pelestarian warisan budaya bangsa tidak semua bisa mendapat kesempatan sebagaimana perusahaan perkebunan lain. Lahirnya UU pemajuan kebudayaan dapat dijadikan momentum PT Tirta Madu memulai bekerjasama hingga terpublikasi media. Memang efek pemberitaan media massa, dapat ditangkap berbeda berdasarkan faktor individu dan faktor sosial. Faktor objek pemajuan kebudayaan di Kawasan Situs BKKD. Efek yang ditimbulkan dari pemberitaan media massa, mencakup karakteristik



profil pribadi lepas pribadi dari masyarakat yang menangkap pesan pemberitaan tersebut. Dengan kata lain, perbedaan dari tiap manusia turut menentukan daya tangkap terhadap makna isi pesan dari pemberitaan. Adapun faktor sosial maksudnya untuk menjelaskan bagaimana keadaan setiap masing-masing individu, pada saat menangkap pemberitaan tersebut (Nurudin 2007: 195--199). Bisa saja mayoritas masyarakat sekitar kawasan Situs BKKD, tidak merasa terganggu atau sebaliknya ketika PT Tirta Madu terpublikasikan perhatiannya terhadap upaya pemajuan Kawasan Situs BKKD di Kabupaten Bintan. Maka untuk menarik perhatian, sudah seharusnya memiliki strategi komunikasi yang baik teristimewa mampu bersinergi dengan para stakeholder dalam upaya pemajuan kawasan Situs BKKD.

Maka sangat diharapkan PT Tirta Madu melalui Dana CSRnya memiliki strategi komunikasi yang baik yang dapat dilakukan terhadap pemajuan kawasan Situs BKKD. Nugraha dalam tulisannya mengatakan kalau kegiatan komunikasi CSR secara intensif dan terbuka kepada lintas media sehingga stakeholder dengan sendirinya mengetahui tentang kegiatan CSR apa saja yang dilakukan oleh pihak perusahaan (Nugraha, dkk.2015 : 126 - 127). PT Tirta Madu dengan program CSRnya dapat mulai memvariasikannya dengan tetap berdasarkan pada potensi latar belakang pendidikan, aspirasi dan tingkat kemampuan yang ada di masyarakat sekitar. Sebagai contoh : kerusakan Situs BKKD dimana publik yang tidak mengerti dan tidak paham CSR dengan gampang berargument, "Itu kan tanggung jawab pemerintah. Selama perusahaan tidak melanggar hukum, urusan kebijakan penggunaan dana CSR tentu terserah mereka. Maka dalam model komunikasi lingkungan yang dirancang, Sinergitas PT Tirta Madu dalam Pemajuan Kawasan Situs BKKD di Kabupaten Binta Situs BKKD harus transparan soal jumlah dana yang dianggarkan. Jangan sampai stakeholder menduga-duga berapa dana yang akan dikeluarkan PT Tirta Madu untuk dana CSR perusahaan. Bukan hal yang aneh ketika perusahaan atau kawasan industri kerap didatangi untuk minta Dana CSR melalui „proposal fiktif“. Biasanya perusahaan sebenarnya tak ingin memberi sebelum memastikan nilai penting proposal tersebut. Tapi kalau tak diberi ada kekhawatiran mereka akan melakukan kegiatan yang menghambat aktivitas perusahaan. Alhasil Dana CSR diberikan dan



jumlah yang dianggarkan perusahaan habis tanpa menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai penting berdayaguna.

D. Tujuh agenda strategis kebudayaan nasional terkait pemajuan Kawasan Situs BKKD

Tujuh agenda strategis kebudayaan nasional yang dicanangkan pemerintah pada Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) Tahun 2018, akan menjadi pedoman kemajuan kebudayaan nasional sampai 20 tahun ke depan. Dalam kaitan tulisan ini, ketujuh strategi tersebut dimasukkan sebagai indikator sinergitas PT Tirta Madu dengan para stakeholder. Berikut dijelaskan sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1. Tujuh Agenda Strategis Pemajuan Kebudayaan sebagai indikator tercapainya upaya pemajuan Kawasan Situs BKKD melalui sinergitas PT Tirta Madu dengan para stakeholder

Tujuh agenda strategis pemajuan kebudayaan sebagai indikator sebagai bagian indikator tercapainya upaya pemajuan Kawasan Situs BKKD melalui sinergitas PT Tirta Madu dengan para stakeholder	
1	Penyediaan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi budaya. Dalam kaitan tulisan ini, sinergitas PT Tirta Madu dan para stakeholder memprogramkan penyediaan sarana prasana yang mendukung semakin memperkuat kebudayaan yang inklusif pada zona inti dan zona penyangga (tanah milik negara).
2	Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional. Dalam kaitan tulisan ini, sinergitas PT Tirta Madu dan para stakeholder memprogramkan Bantuan bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan melalui penyediaan kapal yang melintas di Sungai Kawal hingga ke dermaga terdekat menuju Situs BKKD.
3	Fasilitasi pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan untuk memperkuat promosi. Dalam kaitan tulisan ini, obyek pemajuan kebudayaan masyarakat Kawal misalkan seni drama tari dalam bentuk pementasan <i>mak yong</i> . Sinergitas PT Tirta Madu dan para stakeholder memprogramkan membantu mereka melalui pembinaan sanggar pertunjukan <i>makyong</i> .



4	Memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan tulisan ini, sinergitas PT Tirta Madu dan para stakeholder memprogramkan penyediaan sarana prasana yang mendukung seperti point no 1.
5	Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem. Dalam kaitan tulisan ini, poin ini sesuai dengan harapan melalui komunikasi lingkungan Sinergitas PT Tirta Madu dengan para stakeholder.
6	Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan. Dalam kaitan tulisan ini, sinergitas PT Tirta Madu dan para stakeholder memprogramkan komitmen ketersediaan anggaran masing-masing dalam menjalankan program-program yang sudah disepakati jauh sebelumnya.
7	Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan. Dalam kaitan tulisan ini, sinergitas PT Tirta Madu dan para stakeholder, ada masa / tahapan kedepannya dimana institusi pemerintah lebih dominan bersinergi sebagai fasilitator.

Tujuh agenda strategis kebudayaan nasional diatas merupakan sebuah contoh usulan kiranya PT Tirta Madu dan stakeholder lainnya mau berkontribusi berpartisipasi melaksanakan program pemerintah tersebut sebagai visi pemajuan kebudayaan jangka panjang. Maka melalui upaya sinergitas PT Tirta Madu dan stakeholder lainnya, pemajuan Kawasan Situs BKKD di Kabupaten Bintan dapat terwujud. Setelah ada agenda strategis, untuk mewujudkannya diperlukan semacam model yang menjadi semacam panduan yang dalam hal tulisan ini fokus pada model komunikasi lingkungan. Pentingnya kajian komunikasi dalam hal ini untuk menghindarinya terjadinya potensi konflik akibat missskomunikasi.

E. Model Komunikasi Lingkungan Sinergitas Pemajuan Kawasan Situs BKKD

Model komunikasi lingkungan yang coba ditawarkan merupakan skema langkah-langkah teknis diawali keaktifan PT Tirta Madu untuk bersinergi dengan



berbagai stakeholder. Berangkat dari kesadaran akan potensi menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air, udara, dan tanah kawasan Situs BKKD, model yang dirancang bersifat holistik, agar pemajuan kawasan ikut terbenahi. Hapsari mengatakan upaya pelestarian lingkungan hidup bersifat holistik dan membutuhkan dukungan dari semua pihak. Harus ada jaringan komunikasi untuk menggalang kekuatan lintas stakeholder untuk mendorong gerakan sosial yang efektif. Jaringan komunikasi menjadi modal sosial sekaligus sebagai suatu strategi mencapai keseimbangan lingkungan (hapsari, 2016 : 35). Dalam sebuah diskusi dengan beberapa masyarakat sekitar Situs BKKD, pernah muncul keinginan generasi muda membentuk lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada aksi penyelamatan dan pengelolaan situs BKKD sebagai objek wisata. Namun hingga tahun 2017, ketika peneliti kembali ke situs, belum bisa terealisasi. Memang bukan pekerjaan yang mudah ataupun susah membuat sebuah gerakan sosial kalau belum jelas dan terbentuk jaringannya. Apalagi butuh kiat khusus memperdayakan generasi muda yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan.

Model komunikasi (gambar 2) coba menjaring dan menciptakan generasi muda yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungannya. Kesadaran tersebut seharusnya mulai muncul dari dalam keluarga sebagai pranata sosial pertama dan utama. Dalam model (gambar 2) faktor diluar keluarga seperti lembaga non pemerintah yang terjun mendampingi kawula muda di sekitar situs. Selama lebih dari enam tahun penggalian arkeologis di Situs BKKD, tim selalu melibatkan generasi muda usia bercampur orang tua. Setiap istirahat makan siang, tim selalu makan bersama, untuk menciptakan suasana kekeluargaan sambil tim peneliti mentransfer pemahaman kepada mereka nilai penting situs. Bakti (dkk) mengatakan kalau peran pranata sosial dapat dimanfaatkan oleh penggiat lingkungan sebagai akses / jalan masuk dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasi lingkungan. Individu-individu yang tergabung dalam pranata sosial diharapkan sudah saling kenal dengan penggiat lingkungan, sehingga mudah diajak kerjasama memperluas jaringan (Bakti, 2017 : 106). Dalam model komunikasi (gambar 2), menampakkan jaringan pekerjaan masing-masing saling bersinggungan. Kesemua unsur secara sistematis saling mempengaruhi terhadap



tujuh agenda strategis pemajuan kebudayaan. Dalam model yang dirancang, dominasi PT Tirta Madu sengaja dimunculkan, karena menjadi semacam pancingan. Ketika pihak swasta mulai bergerak, maka lambat laun pemerintah biasanya akan turut ambil bagian.

Institusi pemerintah hanya akan sebagai fasilitator yang biasanya akan intensif ketika respon kuat dari publik. Dengan penggabungan tiga isu besar (kawasan cagar budaya + objek-objek pemajuan kebudayaan + fenomena potensi kerusakan lingkungan), diyakini mampu menekan anggaran pemerintah dalam memfasilitasi upaya / tahapan-tahapan pemajuan Kawasan Situs BKKD. Pembuatan sebuah model komunikasi lingkungan yang matang dan dipahami bersama oleh antar institusi pemerintah, akan mampu meminimalisir potensi-potensi konflik yang terjadi setelah Situs BKKD semakin mengalami pemajuan. Model komunikasi (gambar 2) dapat terealisasi melalui dukungan dana CSR PT Tirta Madu. Selanjutnya keterlibatan pemerintah, secara aktif melalui penganggaran akan muncul dan bisa saja pemerintah kembali dominan bersinergi secara berkelanjutan. Para arkeolog sebagai fasilitator pemerintah pemerintah kembali berperan aktif hingga ke tahap pemajuan kawasan Situs BKKD. Menurut Ririmase, institusi arkeologi sebagai fasilitator pemerintah harus mampu berperan sebagai mediator untuk menjawab tantangan, dengan mengembangkan strategi kreatif mengakomodasikan aspek sosial dalam pemanfaatan sumber daya budaya (Ririmase, 2008 : 41). Misalkan dalam sebuah diskusi dengan masyarakat sekitar Situs BKKD, ada keinginan mengelola kawasan situs sebagai tempat perkemahan anak sekolah. Namun keinginan tersebut terbentur soal dana dan kekhawatiran melanggar UU. Mereka juga tidak terima bila masyarakat luar Kawal akan mengelola situs BKKD. Hal ini yang menyebabkan konflik kepentingan bisa muncul kapan saja ketika ada stakeholder mulai „bergerak“.

Konflik kepentingan akan membentuk satu pola perilaku tertentu untuk menghadapi lawannya. Pola perilaku dalam menghadapi situasi konflik disebut sebagai gaya manajemen konflik (Wirawan 2010, 134). Dalam model komunikasi yang dibuat perlu memasukkan kajian manajemen konflik antar stakeholder. Bisa muncul konflik kepentingan ketika PT Tirta Madu lebih aktif menggunakan dana CSR perusahaan, namun tidak tahu kepada siapa saja bersinergi. Bila sudah ada



publik merespon untuk terlibat, tinggal di fasilitasi bekerja sesuai kesepakatan antar pemangku kepentingan (ini masuk tahapan penentuan rencana kebijakan dan strategi pelaksanaan). Idealnya institusi pemerintah berkewajiban membuat rencana strategis terkait pemajuan kebudayaan, termasuk para arkeolog peneliti (aparatur negara) yang tidak bisa lagi hanya mengandalkan metode ilmiah yang terkesan menjurus bahwa mereka saja yang paling berhak mengembangkan sumberdaya budaya (Handoko, 2008 : 33). Maka pembuatan model komunikasi lingkungan menjadi sebuah langkah awal. PT Tirta Madu sebagai sebuah perusahaan perkebunan yang dalam wilayah perkebunannya, terdapat Kawasan Situs BKKD suka tidak suka memiliki tanggungjawab turut memajukannya.



Gambar 2: Konsep model pengembangan strategi komunikasi lingkungan PT Tirta Madu dalam upaya pemajuan Kawasan Situs Bukit Kerang Kawal Darat

3. KESIMPULAN

Sinergitas PT Tirta Madu dengan berbagai stakeholder (pemerintah, akademisi, dan masyarakat setempat melalui lembaga swadaya) dalam upaya pemajuan kawasan Situs BKKD merupakan sebuah keniscayaan. Model komunikasi lingkungan menjadi sebuah konsep teknis agar sinergitas terurai secara sistematis, mudah dijalankan. Tujuh agenda strategis kebudayaan nasional dimasukkan kedalam model sebagai indikator pendeteksi keberhasilan upaya pemajuan. Model yang ditawarkan seperti pada gambar 2 pada dasarnya masih



tataran konsep yang perlu penjabaran lebih teknis agar lebih cepat terjadi apabila ada yang berinisiatif memelopori menjalankan model tersebut. Dengan mengangkat isu kerusakan lingkungan pada kawasan cagar budaya, diyakini konsep model seperti pada gambar 2 dapat dimatangkan melalui pembentukan tim yang dapat merumuskan model tersebut. Kajian pembuatan model komunikasi lingkungan ini bisa dipelopori oleh PT Tirta Madu. Pengembangan model kajian komunikasi lingkungan diyakini akan sangat membantu upaya pemajuan kebudayaan. Stakeholders akan terarah ambil bagian sejak dari tahapan awal dan terus berkomitmen terlibat dalam tahapan-tahapan pemajuan kawasan cagar budaya Situs BKKD yang ramah lingkungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga banyak data hasil penelitian Situs BKKD dari tahun 2011 – 2018 dapat dimanfaatkan untuk kepentingan praktis maupun teoritis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para pembaca yang memberikan masukan baik berupa saran dan kritik perbaikan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakti, I. dkk. (2017). Pemberdayaan Pranata Sosial Melalui Komunikasi Lingkungan : Menakar Pelibatan Peran Perempuan Dalam Mitigasi Banjir Citarum. *Jurnal Kawistara*, Vol. 7, No. 1. : 94-107.
- Eppang. (2017). “Kemendikbud fokus 10 objek pemajuan kebudayaan”. (<http://www.netralnews.com/news/pendidikan/read/83238/kemendikbud.fokus.10.objek.pemajuan.kebudayaan>, diakses 21 Juni 2018).
- Handoko, W. (2008). Arkeologi Komunitas : Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Penelitian Arkeologi di Indonesia (Sebuah Pendekatan untuk Wilayah Penelitian di Maluku). *Kapata Arkeologi Vol. 4. (7) : 23 – 36*.
- Hapsari, R. D. (2016). Peran Jaringan Komunikasi Dalam Gerakan Sosial Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup. *Jurnal Komunikasi ISKI. (01) : 25-36*.
- Herutomo. (2013). Komunikasi Lingkungan Dalam Mengembangkan Hutan Berkelanjutan. *Jurnal Acta diurna. Vol 9 No. 2. Hal. 37-48*.
- Kurnia, N. (2015). Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Media Baru: Implikasi terhadap Teori Komunikasi. *Jurnal MEDIATOR, Vol. 6 No.2 : 291 – 296*.
- Merriman, N. (2004). Introduction : Diversity and Dissonance in Public Archaeology. In Nick Merriman (ed.). *Public Archaeology*. 1-18. London:



- Routledge.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurudin. 2007. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: Grafindo.
- Restiyadi, A. (2009). Identitas Budaya, kreativitas dan Kajian Arkeologi Publik. *Berkala Arkeologi Sangkhakala Vol XII No.23* : 1 – 7.
- Ririmasse, M. (2008). Siklus Informasi Arkeologi : Menuju Pemasarakatan Hasil Penelitian yang Terintegrasi di Balai Arkeologi Ambon. *Kapata Arkeologi Vol. 4 (7)* : 37 – 51.
- Seftiawan. (2018). “Setelah Menunggu 35 Tahun, RUU Kebudayaan Disahkan DPR”. (<http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2017/04/28/setelah-menunggu-35-tahun-ruu-kebudayaan-disahkan-dpr-400048>, diakses 1 Juni 2018).
- Simatupang, dkk. (2017). *Ekskavasi dan Kajian Manajemen Arkeologi Situs Bukit Kerang Kawal Darat di Kabupaten Bintan, Prov. Kepulauan Riau*. BPA. No. 32. Medan: Balai Arkeologi Sumatera Utara.
- Suparman. (2013). Corporate Social Responsibility : Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Kepedulian Perusahaan dengan Masyarakat. *JURNAL INTERAKSI*. Vol II No.2 : 69-81.
- Surbakti, K. (2017). Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 (Perihal Pemberian Insentif dan Kompensasi). *Kapata Arkeologi Vol. 13 (2)* : 141 – 150.
- Wahyudin, U. (2017). Strategi Komunikasi Lingkungan Dalam Membangun Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. *Jurnal Common Vol.1 Nomor 2*. Desember 2017. Hal.130-134.
- Wirawan. (2010). *Konflik dan Manajemen Konflik : Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta : Salemba Humanika.

PERATURAN-PERATURAN

- UU RI No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
UU RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

